

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disajikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bank Syariah Indonesia sudah menjalankan amanat dari Undang-Undang No.21 tahun 2008, melalui penyaluran pembiayaan produktif untuk UMKM selain itu BSI juga memiliki komitmen-komitmen dalam mendukung kemajuan atau perkembangan UMKM. Namun pembiayaan produktif Bank Syariah Indonesia untuk UMKM masih belum optimal karena pembiayaan bank syariah di sektor konsumtif masih dominan. Masih banyak UMKM yang belum mendapatkan akses pembiayaan, hal ini dikarenakan pembiayaan produktif untuk UMKM cenderung memiliki risiko kredit yang lebih tinggi karena terkait dengan proyek bisnis atau investasi yang berpotensi gagal. BSI mungkin lebih berhati-hati dalam mengevaluasi dan menyetujui aplikasi pembiayaan produktif untuk mengurangi risiko kerugian.
2. Bentuk BSI dalam mendukung SDGS yang salah satu misinya yaitu pengentasan kemiskinan dan pengangguran, melalui pembiayaan produktif terhadap UMKM. Alasan kenapa UMKM yaitu, UMKM yang menyentuh secara langsung SDGS. Melalui kontributor UMKM yang dapat menyerap tenaga kerja, memberi peluang pendapatan pada masyarakat banyak, dan sumbangsuhnya melalui PDB UMKM dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Terbukti dari data BPS angka kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan. Hal ini juga mengantarkan Indonesia pada sustainable report 2023 berada di peringkat ke-75 dunia. skor Indonesia mengalami peningkatan 70,2 pada 2023. Posisi Indonesia kini juga berada di peringkat ke-4 untuk kawasan ASEAN. Indonesia telah membuat progres yang signifikan dalam beberapa aspek SDGS. Untuk itu dana support yang ada pada BSI untuk UMKM ditujukan, agar UMKM lebih berkembang dan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak, memberikan penghasilan kepada masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan.

B. Saran

Bank Syariah Indonesia dalam hal ini harus lebih meningkatkan porsi pembiayaan produktif untuk UMKM yang ingin mengembangkan usahanya, dan mempunyai keterbatasan dalam hal permodalan. Perlunya pengalokasian dana modal kerja yang sesuai dengan kebutuhan usaha, sehingga dapat mencapai perkembangan suatu usaha yang diinginkan. Melihat pentingnya peran UMKM bagi pembangunan ekonomi, BSI lebih memfokuskan lagi terkait penyaluran pembiayaan produktif untuk UMKM, hal ini juga menjadi wujud komitmen BSI untuk mendukung pencapaian SDGS dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

